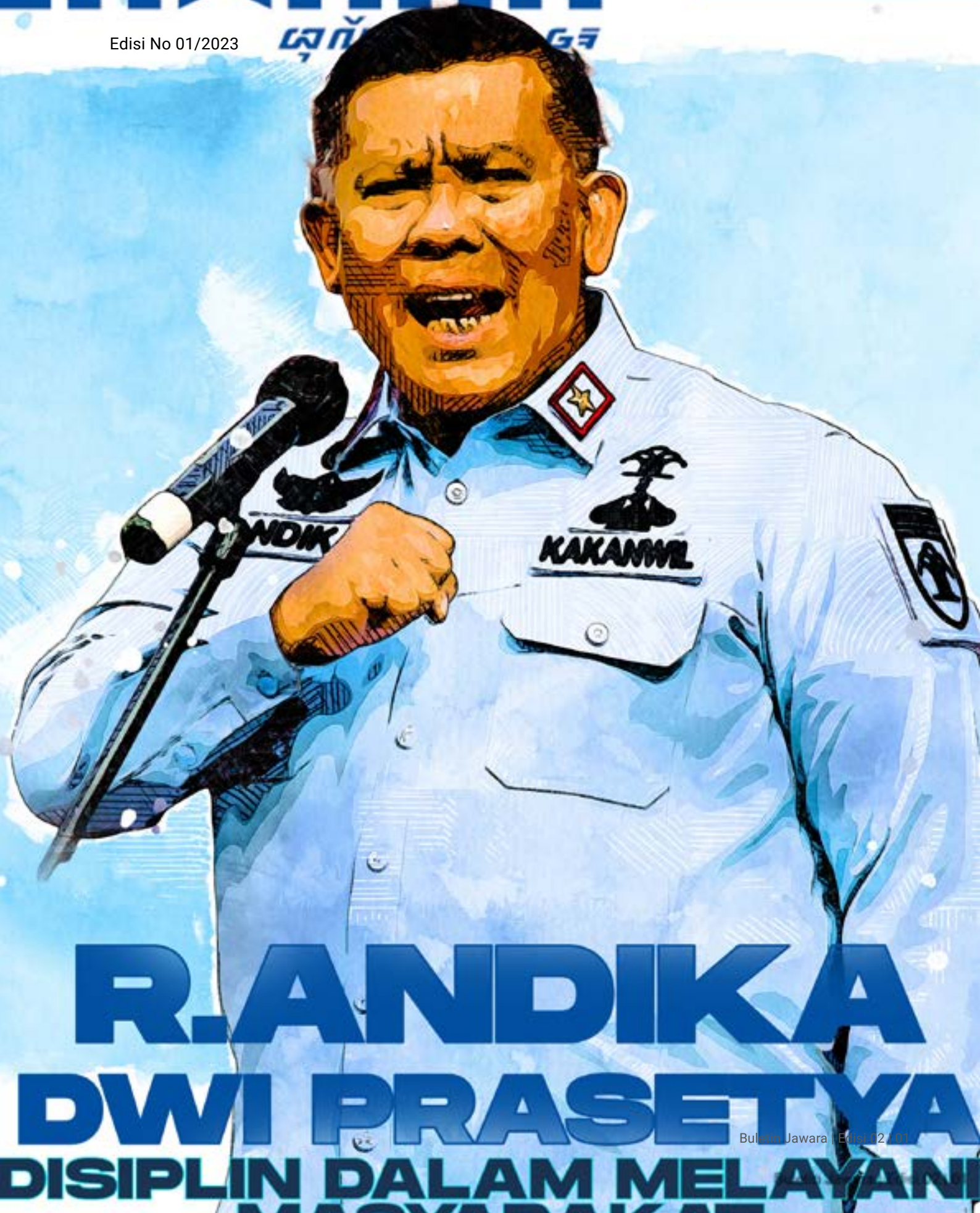


JAWARA

KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN
JAWA BARAT

Edisi No 01/2023

ഭൂമി സമൃദ്ധി



R. ANDIKA

DWI PRASETYA

DISIPLIN DALAM MELAYANI MASYARAKAT

DAFTAR ISI

EDITORIAL

MELAYANI DENGAN HATI
04-05



FOKUS

PENINGKATAN DISIPLIN DA-
LAM PENINGKATAN KUA-
LITAS PELAYANAN PUBLIK:
STRATEGI DAN IMPLEMEN-
TASI

06-07

SOROT

**DIVISI YANKUM:
INISIATIF BARU DALAM
PENEGAKAN HUKUM DAN
PERLINDUNGAN HAK ASASI
MANUSIA**
14-15

**DIVISI PAS: PENINGKATAN
PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU DI BIDANG
ADMINISTRASI
PEMASYARAKATAN**
16-17

**DIVISI KEIMIGRASIAN:
OPTIMALISASI
PENGAWASAN DAN
PELAYANAN ORANG ASING
DI JAWA BARAT**
18-19

**DIVISI ADMIN:
TRANSFORMASI
ADMINISTRASI UNTUK
EFISIENSI DAN KUALITAS
PELAYANAN**
20-21



CAKRAWALA

**JANGKAU CIVITAS
AKADEMIKA,
KEMENKUMHAM R.I.
KEMBALI GOES TO
CAMPUS DI 2023**

26-27



PENJURU JAWARA

**ANYAMAN ROTAN HASIL
KARYA WARGA BINAAN
LAPAS MAJALENGKA
TEMBUS
PASAR DUNIA /EKSPOR**
28

**LANGKAH EFEKTIF DALAM
PEMBERITAAN DI MEDSOS,
RUPBASAN INDRAMAYU
PERINGKAT 3 TERATAS
PUBLIKASI UPT.**

29



Diterbitkan Oleh: Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat | **Penasihat:** Kepala Kantor Wilayah | **Pengarah:** Kepala Divisi Administrasi, Kepala Divisi Pemasyarakatan, Kepala Divisi Keimigrasian, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Dan Ham | **Penanggung Jawab:** Kepala Bagian Program Dan Hubungan Masyarakat | **Pemimpin Redaksi:** Kepala Sub Bagian Humas, RB, Dan TI | **Tim Redaksi:** Agung Irawan, Sugiwan, Lamhot Robinson, Agung Toh Wibawa, Bayu Angga Dwiguna, Randy Anwar Romadhony | **Redaktur Foto :** Abdul Azis, Adiiib Helmi | **Desain Grafis Dan Layout:** Agies Hendra Irawan, Aulia Kharisma Putra | **Sekretariat:** Febri Putra Pratama, Adhi Garvilla, Indri Hendiani, Abdillah Maburur | **Alamat Redaksi:** Jl. Jakarta No 27 Bandung

MELAYANI DENGAN HATI

Selamat datang di edisi kuartal pertama tahun 2023 dari Buletin Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat! Dalam edisi ini, kami akan membahas isu-isu penting yang menarik perhatian kita semua, terutama dalam hal disiplin pegawai dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kami menyadari betapa pentingnya peran pegawai dalam menciptakan perubahan positif dalam layanan yang diberikan kepada masyarakat, dan edisi kali ini akan mengupas tuntas topik tersebut.

Pertama, kita akan menggali lebih dalam mengenai berbagai inisiatif dan strategi yang telah dilakukan oleh divisi-divisi di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat. Sorotan utama meliputi Divisi Yankum, Divisi PAS, Divisi Keimigrasian, dan Divisi Admin. Kami akan menjelajahi bagaimana masing-masing divisi telah berkontribusi dalam menciptakan perubahan positif, serta bagaimana mereka menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Selain itu, kita akan melihat bagaimana setiap divisi menciptakan inovasi dalam menangani berbagai tantangan yang dihadapi. Dari penggunaan teknologi terkini hingga pelatihan

dan pengembangan pegawai, kita akan membahas langkah-langkah yang diambil oleh masing-masing divisi untuk menjaga kualitas pelayanan tetap tinggi.

Kemudian, kita akan mengenal lebih dekat sosok Kepala Kantor Wilayah, R. Andika Dwi Prasetya. Dalam artikel ini, kita akan mengulas daftar riwayat hidupnya, tantangan yang dihadapi dalam jabatannya di Jawa Barat, prinsip hidup yang memandu kesehariannya, serta pencapaian prestasi dalam pekerjaannya. Kita juga akan membahas bagaimana kepemimpinan Andika Dwi Prasetya membantu membentuk visi dan misi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat dalam mencapai tujuan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Selanjutnya, kita akan membahas wawancara eksklusif dengan Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Andi Taletting Langi. Beliau akan menjelaskan bagaimana birokrasi digital dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik dan langkah-langkah yang telah diambil oleh divisi tersebut dalam menerapkan teknologi ini. Diskusi ini akan mencakup manfaat dan tantangan yang muncul dari implementasi teknologi digital serta bagaimana lembaga ini menangani perubahan yang terjadi dalam lingkungan kerja sebagai akibat dari transformasi digital.

Dalam fokus utama edisi ini, kita akan membahas pentingnya peningkatan disiplin dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik. Kami akan mengeksplorasi berbagai cara untuk meningkatkan disiplin pegawai, mulai dari pelatihan, pengawasan, hingga penerapan sistem insentif dan sanksi yang efektif. Selain itu, kita juga akan membahas dampak positif yang dihasilkan dari peningkatan disiplin pegawai, seperti peningkatan kepuasan masyarakat, efisiensi dalam pelayanan, dan citra positif dari lembaga pemerintah.

Edisi ini juga akan membahas kegiatan „Kumham Goes to Campus“, yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai peran dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM, serta menjembatani komunikasi antara kementerian dan generasi muda. Kami akan menyoroti berbagai kegiatan yang telah dilakukan dalam program ini, termasuk diskusi panel, seminar, dan workshop, serta bagaimana dampak dari program ini terhadap peningkatan pemahaman generasi muda tentang sistem hukum dan peran mereka dalam menjaga keadilan dan hak asasi manusia.

Selain itu, kita akan mengulas inovasi terbaru yang telah diperkenalkan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum



dan HAM Jawa Barat, yaitu aplikasi „Jabar One“. Aplikasi ini dirancang untuk memudahkan akses layanan dan meningkatkan efisiensi dalam pelayanan kepada masyarakat. Kami akan membahas fitur-fitur unggulan aplikasi ini, serta bagaimana aplikasi ini telah membantu mempercepat proses pelayanan dan memberikan pengalaman yang lebih baik bagi pengguna.

Kami juga akan menyampaikan berbagai upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan kolaborasi antara Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat dengan lembaga pemerintah lainnya, sektor swasta, dan organisasi masyarakat sipil. Kolaborasi ini penting untuk menciptakan sinergi dalam mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan, dan dalam edisi ini, kita akan memaparkan contoh-contoh kolaborasi yang berhasil dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Terakhir, kita akan menyoroti beberapa prestasi dan penghargaan yang telah diraih oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat,

sebagai bukti komitmen lembaga ini dalam mencapai standar pelayanan publik yang tinggi. Penghargaan ini menjadi semangat bagi pegawai untuk terus berinovasi dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.

Kami berharap edisi ini akan memberikan wawasan yang berharga bagi para pembaca mengenai berbagai upaya yang telah dilakukan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat dalam meningkatkan disiplin pegawai dan kualitas pelayanan publik. Selamat membaca, dan semoga Anda mendapatkan inspirasi dari kisah-kisah sukses yang kami sajikan dalam edisi ini!

PENINGKATAN DISIPLIN DALAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK: STRATEGI DAN AKSI NYATA

Kualitas pelayanan publik menjadi cerminan kinerja pemerintah dalam melayani kebutuhan masyarakat. Peningkatan kualitas pelayanan publik tak lepas dari peran pegawai yang disiplin dan berintegritas. Seperti yang diungkapkan oleh Prof. Dr. Bintoro Wardiyanto, ahli administrasi publik, "Disiplin pegawai merupakan pondasi utama dalam pencapaian pelayanan publik yang responsif, efisien, dan akuntabel." Dalam artikel ini, kita akan membahas strategi dan aksi nyata dalam meningkatkan disiplin pegawai untuk mencapai peningkatan kualitas pelayanan publik.

Membangun Fondasi Disiplin melalui Kebijakan dan Regulasi

Langkah awal yang penting dalam menciptakan disiplin pegawai yang baik adalah penguatan kebijakan dan regulasi terkait disiplin pegawai. Kebijakan dan regulasi yang jelas, transparan, dan konsisten akan membantu pegawai untuk memahami harapan dan standar yang diinginkan, serta konsekuensi yang akan dihadapi jika melanggar disiplin. Menurut Prof. Dr. Bintoro Wardiyanto, "Kebijakan dan regulasi yang jelas akan mampu mengarahkan perilaku pegawai sesuai dengan prinsip good governance."

Menciptakan Budaya Kerja yang Disiplin

Pembinaan karakter dan budaya kerja yang baik menjadi salah satu langkah strategis dalam peningkatan disiplin pegawai. Melalui pembinaan ini, pegawai akan diajarkan nilai-nilai, etika, dan moral dalam bekerja, yang pada akhirnya akan membentuk pola pikir dan perilaku yang disiplin. Dr. Ratih Ibrahim, seorang ahli manajemen sumber daya manusia, menegaskan bahwa "Pembinaan karakter dan budaya kerja yang baik akan menghasilkan pegawai yang memiliki komitmen tinggi dalam melayani masyarakat."

Meningkatkan Kapasitas dan Kompetensi Pegawai

Pegawai yang memiliki kapasitas dan kompetensi yang baik akan lebih mudah untuk disiplin dalam bekerja. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas dan kompetensi pegawai menjadi salah satu strategi dalam peningkatan disiplin. Melalui pelatihan, workshop, dan program pengembangan lainnya, pegawai akan diberikan pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman yang diperlukan untuk melaksanakan tugas mereka secara disiplin dan efisien. Prof. Dr. Arief Rachman, seorang ahli pendidikan, mengatakan bahwa "Pegawai yang

memiliki kompetensi tinggi akan mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas dan memenuhi harapan masyarakat."

Menerapkan Sistem Pengawasan dan Evaluasi yang Efektif

Sistem pengawasan dan evaluasi yang efektif akan membantu dalam memastikan disiplin pegawai dan menilai kinerja mereka secara objektif. Melalui sistem ini, pegawai yang melanggar disiplin dapat diidentifikasi dan diberikan sanksi yang sesuai, sementara mereka yang menunjukkan kinerja baik dapat diapresiasi dan diberikan insentif. Dr. Rini Handayani, seorang ahli administrasi publik, berpendapat bahwa "Pengawasan yang efektif dan evaluasi kinerja yang rutin akan mendorong pegawai untuk selalu menjaga disiplin dan meningkatkan kualitas pelayanan publik."

Adopsi Teknologi dalam Pelayanan Publik

Penerapan teknologi dalam pelayanan publik juga dapat menjadi salah satu cara untuk meningkatkan disiplin pegawai. Dengan teknologi, proses pelayanan menjadi lebih



efisien dan transparan, sehingga pegawai akan lebih mudah untuk mematuhi aturan dan prosedur yang ada. Selain itu, teknologi juga dapat digunakan untuk memantau kinerja pegawai secara real-time dan mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan. Prof. Dr. Surya Dharma, seorang ahli teknologi informasi, menyatakan bahwa "Pemanfaatan teknologi dalam pelayanan publik akan mendorong disiplin pegawai dan menciptakan pelayanan yang lebih cepat, mudah, dan akuntabel bagi masyarakat."

Peningkatan disiplin pegawai merupakan aspek penting dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik, khususnya di lingkungan pemerintahan. Melalui penguatan kebijakan dan regulasi, pembinaan karakter dan budaya kerja, peningkatan kapasitas dan kompetensi pegawai, sistem pengawasan dan evaluasi yang efektif, serta penerapan teknologi dalam pelayanan publik, diharapkan disiplin pegawai dapat ditingkatkan secara signifikan.



Namun, peningkatan disiplin pegawai bukanlah upaya yang instan dan memerlukan komitmen serta dukungan dari semua pihak, baik manajemen, pegawai, maupun masyarakat. Oleh karena itu, sinergi dan kolaborasi antara berbagai pihak menjadi kunci dalam mewujudkan peningkatan disiplin pegawai dan kualitas pelayanan publik yang unggul.

Dalam jangka panjang, peningkatan disiplin pegawai yang berhasil akan berdampak positif

terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik, kepercayaan masyarakat, serta citra dan integritas pemerintahan. Oleh karena itu, upaya peningkatan disiplin pegawai harus terus dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan, sebagai bagian dari komitmen pemerintah dalam mewujudkan pelayanan publik yang inklusif, cepat, dan mudah bagi seluruh masyarakat.

27 JANUARI

KOLABORASI DENGAN KOMUNITAS TAJIR, KEMENKUMHAM JABAR BERSAMA 180 PENGUSAHA BERBAGI ILMU DALAM TAKJUB AKBAR 2023 (27/01)



27 JANUARI

LANJUTKAN PROGRAM "GERBANG TRANSISI" IRJEN RAZILU DAN PIMTI KEMENKUMHAM JABAR SAMBANGI KANIM DEPOK (27/04)



30 JANUARI

TAMBAH MOTOR PENGGERAK KEIMIGRASIAN JABAR, KAKANWIL ANDIKA AMBIL SUMPAH 27 PNS DI LINGKUNGAN KEMENKUMHAM JABAR (30/01)



1 FEBRUARI

KONFERENSI PERS KAKANWIL KEMENKUMHAM JABAR (ANDIKA) TERKAIT PENANGKAPAN WNA MALAYSIA OVERSTAYING OLEH KANIM CIREBON DAN TIM PORA KABUPATEN CIREBON (01/02)



24 FEBRUARI

PERLINDUNGAN DAN PEMANFAATAN KI UNTUK MASYARAKAT, KANWIL KEMENKUMHAM JABAR LAKUKAN SOSIALISASI, PROMOSI, DAN DISEMINASI KEKAYAAN INTELEKTUAL (24/02)



28 MARET

KAKANWIL KEMENKUMHAM JABAR (ANDIKA) PENUHI UNDANGAN RAKOR LINTAS SEKTOR ATR/BPN DEMI WUJUDKAN MISI PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERKUALITAS (28/02)



30 MARET

KAKANWIL KEMENKUMHAM JABAR (ANDIKA) BERIKAN PIAGAM PENGHARGAAN PEGAWAI JUARA GUNA PACU MOTIVASI PEGAWAI DALAM BERKINERJA (30/03)



31 MARET

JELANG BUKA PUASA, MASYARAKAT KIAN ANTUSIAS DENGAN LAYANAN KEKAYAAN INTELEKTUAL YANG DIBUKA KANWIL KEMENKUMHAM JABAR DI MESJID AT-TAQWA CIREBON (31/03)



MEMAJUKAN KEHUMASAN DI UNIT PELAKSANA TEKNIS MELALUI MEDIA SOSIAL DAN MEDIA ONLINE

Di era digital saat ini, peran media sosial dan media online sangat penting dalam membangun komunikasi dan interaksi antara lembaga pemerintah dengan masyarakat. Divisi Administrasi Kemenkumham Jawa Barat, yang memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan kehumasan, telah mengambil langkah proaktif dalam memanfaatkan media sosial dan media online untuk meningkatkan transparansi, efektivitas, dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Salah satu inisiatif yang telah dilakukan oleh Divisi Administrasi Kemenkumham Jabar adalah membangun dan mengelola platform media sosial dan media online yang berkualitas dan informatif, baik pada tingkat kantor wilayah maupun unit pelaksana teknis (UPT).

Berikut ini beberapa langkah strategis yang telah diimplementasikan oleh divisi ini dalam memajukan kehumasan di UPT melalui media sosial dan media daring:

Pembuatan akun media sosial resmi

Divisi Administrasi Kemenkumham Jabar telah mendirikan akun media sosial resmi, seperti Facebook, Instagram, dan Twitter, untuk menyampaikan informasi seputar kegiatan, program, dan pencapaian lembaga, serta untuk menerima aspirasi dan pertanyaan dari masyarakat. Akun-akun ini dikelola secara profesional dan responsif, sehingga dapat menciptakan interaksi yang positif antara Kemenkumham Jabar dengan masyarakat.

Pemanfaatan website resmi

Divisi Administrasi juga telah mengoptimalkan penggunaan

website resmi Kemenkumham Jabar sebagai sumber informasi yang akurat dan terpercaya. Website ini diperbarui secara berkala dengan konten yang informatif, seperti berita, kebijakan, dan informasi layanan, sehingga masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi yang mereka butuhkan.

Pengembangan konten yang menarik dan edukatif

Divisi Administrasi Kemenkumham Jabar telah berkomitmen untuk menciptakan konten media sosial dan media online yang menarik, edukatif, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Konten ini meliputi infografis, video, artikel, dan wawancara, yang disajikan dalam format yang mudah dipahami dan menarik perhatian.

Peningkatan kapasitas pegawai

Untuk memastikan keberhasilan upaya kehumasan

melalui media sosial dan media online, Divisi Administrasi Kemenkumham Jabar telah menginvestasikan waktu dan sumber daya dalam pelatihan dan pengembangan kapasitas pegawai. Pelatihan ini meliputi teknik penyusunan konten, pengelolaan media sosial, serta etika dan protokol komunikasi di media daring.

Monitoring dan evaluasi

Divisi Administrasi secara rutin melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja media sosial dan media online yang dikelola oleh Kemenkumham Jabar dan UPT. Hal ini dilakukan untuk memastikan efektivitas dan efisiensi kegiatan kehumasan, serta untuk mengidentifikasi area perbaikan dan inovasi yang diperlukan.



dan beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan tren komunikasi, guna memastikan keberhasilan kehumasan di era digital. Dengan komitmen yang kuat dan dukungan dari seluruh elemen masyarakat, Kemenkumham Jabar optimis dapat terus meningkatkan kualitas pelayanan dan kepercayaan masyarakat dalam upaya mewujudkan sistem hukum dan pemasyarakatan yang adil, humanis, dan berkualitas.

Kolaborasi dengan stakeholder

Divisi Administrasi Kemenkumham Jabar telah menjalin kerja sama dengan berbagai stakeholder, baik internal maupun eksternal, dalam rangka memajukan kehumasan melalui media sosial dan media online. Kolaborasi ini mencakup berbagi informasi, pelatihan, dan dukungan teknis, serta promosi bersama program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Kemenkumham Jabar dan UPT.

Responsivitas dan transparansi

Salah satu aspek penting dalam memajukan kehumasan melalui media sosial dan media online adalah responsivitas dan transparansi dalam berkomunikasi dengan masyarakat. Divisi Administrasi Kemenkumham Jabar berkomitmen untuk menjawab pertanyaan, keluhan, dan aspirasi masyarakat secara cepat dan akurat, serta untuk menyampaikan informasi yang jelas dan transparan mengenai kebijakan dan keputusan lembaga.

Edukasi dan kampanye

Divisi Administrasi Kemenkumham Jabar telah meluncurkan berbagai edukasi dan kampanye yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai peran dan fungsi Kemenkumham dan UPT, serta

untuk mengajak masyarakat berpartisipasi dalam upaya penegakan hukum dan pemasyarakatan yang adil dan humanis.

Dengan langkah-langkah strategis ini, Divisi Administrasi Kemenkumham Jabar telah berhasil menciptakan kehumasan yang efektif dan dinamis melalui media sosial dan media online. Upaya ini telah membantu meningkatkan citra dan reputasi Kemenkumham Jabar di mata masyarakat, serta memperkuat hubungan antara lembaga pemerintah dengan masyarakat yang mereka layani.

Ke depannya, Divisi Administrasi Kemenkumham Jabar akan terus berinovasi



OPTIMALISASI PENGAWASAN DAN PELAYANAN ORANG ASING DI JAWA BARAT: MEMBANGUN KEAMANAN DAN KUALITAS LAYANAN YANG LEBIH BAIK

Jawa Barat, provinsi yang menarik bagi banyak orang asing, baik untuk tujuan bisnis, pendidikan, pariwisata, maupun pekerjaan, menghadapi tantangan dalam hal pengawasan dan pelayanan. Untuk menciptakan lingkungan yang aman, kondusif, dan ramah bagi orang asing, perlu ada upaya yang lebih optimal dalam mengelola pengawasan dan pelayanan mereka. Esai ini akan membahas beberapa langkah yang perlu diambil untuk mencapai tujuan tersebut.

Salah satu kunci dalam mengoptimalkan pengawasan dan pelayanan orang asing adalah melalui koordinasi dan kerja sama yang baik antara berbagai lembaga terkait, seperti imigrasi, kepolisian, dinas tenaga kerja, dan pemerintah daerah. Koordinasi ini penting untuk memastikan efektivitas dan efisiensi dalam penegakan aturan dan peraturan yang berlaku, serta untuk menghindari tumpang tindih kewenangan antar lembaga.

Selain itu, lembaga-lembaga ini perlu saling berbagi informasi dan data secara terbuka dan transparan, guna membantu dalam pengambilan keputusan dan pembuatan kebijakan yang tepat. Kerja sama antar lembaga juga dapat menciptakan sinergi dalam pengawasan dan pelayanan, sehingga mampu memberikan layanan yang lebih baik bagi orang asing.

Peningkatan kapasitas dan profesionalisme aparat yang terlibat dalam pengawasan dan pelayanan orang asing menjadi faktor penting dalam mengoptimalkan proses tersebut. Aparat harus memiliki pengetahuan dan-



keterampilan yang cukup mengenai peraturan dan prosedur yang berlaku, serta memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan baik dalam berbagai bahasa asing.

Pelatihan dan pendidikan berkelanjutan bagi aparat sangat penting untuk meningkatkan kompetensi mereka dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab. Selain itu, pemberian insentif dan penghargaan bagi aparat yang berprestasi juga dapat meningkatkan motivasi mereka untuk memberikan pelayanan yang lebih baik.

Penerapan teknologi dalam pengawasan dan pelayanan orang asing menjadi salah satu langkah penting dalam mengoptimalkan proses tersebut. Melalui teknologi, proses pengawasan dan pelayanan dapat lebih efisien, cepat, dan akurat. Beberapa contoh penerapan teknologi dalam pengawasan dan pelayanan orang asing, antara lain melalui sistem informasi manajemen imigrasi yang terintegrasi, aplikasi pendaftaran dan pelaporan secara daring, serta sistem pemantauan keberadaan orang asing.

Dengan mengoptimalkan pengawasan dan pelayanan orang asing di Jawa Barat melalui koordinasi antar lembaga, peningkatan kapasitas aparat, dan penerapan teknologi, diharapkan

dapat menciptakan lingkungan yang aman, kondusif, dan ramah bagi mereka. Selain itu, hal ini juga akan membantu mendorong pertumbuhan ekonomi dan pariwisata di Jawa Barat, serta meningkatkan reputasi provinsi ini sebagai tempat yang ramah dan nyaman bagi orang asing yang ingin tinggal, bekerja, atau berkunjung.

Selanjutnya, optimalisasi pengawasan dan pelayanan orang asing juga akan mengurangi risiko terjadinya pelanggaran hukum dan keamanan yang mungkin disebabkan oleh orang asing yang tidak tertib. Dengan demikian, pemerintah dan masyarakat Jawa Barat dapat bekerja sama dalam menciptakan lingkungan yang harmonis dan aman bagi semua pihak yang terlibat.

Pemerintah dan lembaga terkait juga perlu memberikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat lokal tentang pentingnya toleransi dan keberagaman dalam menerima kehadiran orang asing. Hal ini penting untuk menciptakan suasana yang kondusif dan harmonis antara masyarakat lokal dan orang asing.

Terakhir, untuk mencapai optimalisasi pengawasan dan pelayanan orang asing, perlu ada evaluasi berkala dan peningkatan yang terus-menerus. Pemerintah dan lembaga terkait harus senantiasa

mengkaji dan meningkatkan kebijakan serta prosedur yang ada, serta mengembangkan inovasi dan strategi baru guna mengatasi tantangan yang muncul seiring berjalannya waktu.

Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan pengawasan dan pelayanan orang asing di Jawa Barat dapat terus ditingkatkan, menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif bagi mereka, serta memberikan manfaat yang signifikan bagi pertumbuhan dan kemajuan provinsi ini. Sementara itu, masyarakat Jawa Barat juga akan merasakan dampak positif dari kehadiran orang asing, seperti peningkatan perekonomian, pariwisata, dan budaya yang lebih beragam.

DIVISI PEMASYARAKATAN KEMENKUMHAM JABAR: MEWUJUDKAN PEMASYARAKATAN YANG HUMANIS DAN BERKUALITAS



Di era reformasi dan pembangunan yang pesat, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Jawa Barat tidak hanya berfokus pada pelayanan publik dan penegakan hukum, tetapi juga pada upaya pemasyarakatan yang humanis dan berkualitas. Divisi Pemasyarakatan merupakan salah satu divisi penting dalam Kemenkumham Jabar, yang berperan dalam pengelolaan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan (Rutan) di wilayah Jawa Barat.

Divisi Pemasyarakatan Kemenkumham Jabar memiliki visi untuk menciptakan sistem pemasyarakatan yang adil, humanis, dan efektif dalam rangka memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dan menjalankan tugas

pemasyarakatan yang profesional. Dalam mewujudkan visi ini, divisi ini memiliki beberapa misi penting, antara lain:

Meningkatkan kualitas pelayanan dalam pengelolaan Lapas dan Rutan, termasuk fasilitas kesehatan, keamanan, dan kenyamanan bagi warga binaan.

Mengembangkan program pembinaan dan rehabilitasi bagi warga binaan yang berbasis pada hak asasi manusia, dengan tujuan untuk mengurangi angka residivisme dan membantu warga binaan kembali ke masyarakat dengan keterampilan dan mental yang lebih baik.

Meningkatkan koordinasi dan kerja sama dengan instansi terkait, baik di tingkat pusat maupun daerah, dalam rangka penegakan hukum dan pemasyarakatan yang

efektif dan efisien.

Mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dalam pengelolaan dan pelayanan Lapas dan Rutan, guna mendukung transparansi dan akuntabilitas dalam sistem pemasyarakatan. Dalam beberapa tahun terakhir, Divisi Pemasyarakatan Kemenkumham Jabar telah mencatat sejumlah pencapaian dalam upaya mewujudkan sistem pemasyarakatan yang humanis dan berkualitas. Berikut ini beberapa di antaranya:

Pelaksanaan program pembinaan dan rehabilitasi yang komprehensif: Divisi ini telah berhasil mengembangkan berbagai program pembinaan dan rehabilitasi bagi warga binaan, seperti pelatihan keterampilan kerja, pendidikan, dan bimbingan rohani.



Program-program ini bertujuan untuk membantu warga binaan mengembangkan keterampilan yang dibutuhkan untuk menghidupi diri mereka setelah bebas dan menjadi anggota masyarakat yang produktif.

Peningkatan fasilitas dan pelayanan di Lapas dan Rutan: Divisi Pemasyarakatan Kemenkumham Jabar telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan fasilitas dan pelayanan di Lapas dan Rutan, termasuk peningkatan fasilitas kesehatan, kebersihan, dan keamanan. Selain itu, divisi ini juga telah mengembangkan sistem pengelolaan dan pengawasan yang lebih efektif dan efisien, serta meningkatkan transparansi dalam pengelolaan anggaran dan penggunaan dana.

Kolaborasi dengan pihak swasta dan organisasi non-pemerintah: Divisi Pemasyarakatan Kemenkumham Jabar telah menjalin kerja sama dengan berbagai pihak swasta dan organisasi non-pemerintah dalam rangka mendukung program pembinaan dan rehabilitasi warga binaan. Kerja sama ini mencakup penyediaan pelatihan keterampilan,

penyediaan bahan bacaan, serta dukungan dalam program bimbingan rohani dan psikologis.

Penggunaan teknologi dalam pemasyarakatan: Divisi ini telah mengadopsi teknologi informasi dalam pengelolaan dan pelayanan Lapas dan Rutan, seperti penggunaan sistem informasi manajemen pemasyarakatan dan aplikasi monitoring elektronik. Penggunaan teknologi ini telah membantu meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan serta mempercepat proses pelayanan dan pengawasan.

Pengembangan sumber daya manusia: Divisi Pemasyarakatan Kemenkumham Jabar telah berkomitmen untuk mengembangkan kompetensi dan profesionalisme pegawai dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Hal ini dilakukan melalui pelatihan, pendidikan, dan pengembangan karier yang sistematis dan berkelanjutan.

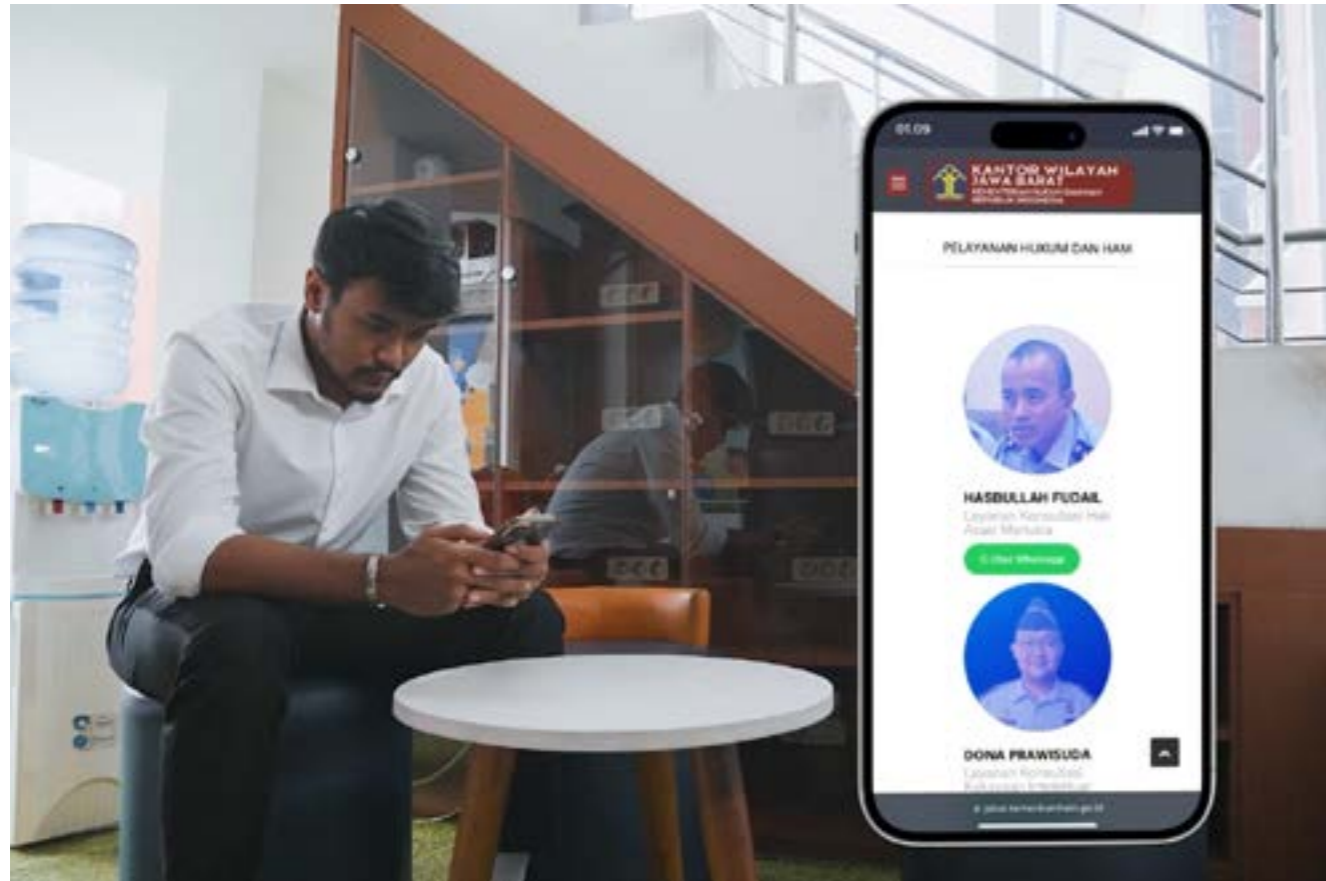
Pencapaian penghargaan: Divisi Pemasyarakatan Kemenkumham Jabar telah meraih berbagai penghargaan dan pengakuan atas komitmen dan pencapaiannya dalam mewujudkan

sistem pemasyarakatan yang humanis dan berkualitas. Penghargaan ini mencakup pengakuan dari pemerintah pusat maupun daerah, serta lembaga internasional yang menilai kinerja dan standar pelayanan pemasyarakatan.

Dalam upaya untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan dan pencapaian visi dan misinya, Divisi Pemasyarakatan Kemenkumham Jabar akan terus berinovasi dan berkolaborasi dengan berbagai pihak. Fokus utama divisi ini adalah untuk menciptakan sistem pemasyarakatan yang adil, humanis, dan efektif, yang mampu menjawab tantangan dan kebutuhan masyarakat di era globalisasi ini.

Dengan dukungan dari seluruh elemen masyarakat, pemerintah, dan pegawai, Divisi Pemasyarakatan Kemenkumham Jabar optimis dapat mewujudkan pemasyarakatan yang humanis dan berkualitas, serta memberikan kontribusi positif bagi pembangunan Jawa Barat yang inklusif dan berkelanjutan.

INOVASI BIROKRASI DIGITAL UNTUK TINGKATKAN PELAYANAN YANG PRIMA KEPADA MASYARAKAT



Dalam rangka memberikan kemudahan akses kepada masyarakat, Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Jawa Barat akan membuka Pos Pelayanan Hukum dan HAM di setiap Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan dan Keimigrasian se Jawa Barat. Pos Pelayanan ini akan dilengkapi dengan perangkat komputer, webcam, dan internet serta furnitur seperti meja dan kursi.

Hal ini memungkinkan masyarakat di seluruh wilayah Jawa Barat untuk mengakses seluruh layanan Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Jawa Barat cukup dengan datang ke UPT

Kemenkumham terdekat. Dengan demikian, pelayanan hukum dan HAM akan semakin mudah diakses dan memberikan kemudahan bagi masyarakat yang membutuhkan.

Selain itu, Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Jawa Barat juga akan mengembangkan layanan berbasis aplikasi Whatsapp. Layanan Whatsapp KAHJI ONLINE ini menyediakan satu nomor untuk semua layanan hukum dan HAM, seperti informasi layanan hukum dan HAM, layanan komunikasi masyarakat, layanan bantuan hukum, penjadwalan konsultasi online, dan sosialisasi peraturan. Dengan menggunakan aplikasi

Whatsapp, masyarakat dapat mengakses layanan hukum dan HAM secara lebih mudah dan cepat. Aplikasi Whatsapp juga memudahkan komunikasi antara Divisi Pelayanan Hukum dan HAM dengan masyarakat, sehingga masalah hukum dan HAM dapat diatasi dengan lebih efektif.

Kedua inovasi ini adalah langkah awal dalam menerapkan birokrasi digital dalam pelayanan hukum dan HAM. Diharapkan dengan pelayanan berbasis birokrasi digital ini, masyarakat akan semakin mudah dan cepat dalam mengakses layanan hukum dan HAM yang disediakan oleh



Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Jawa Barat. Selain itu, penggunaan teknologi digital dalam pelayanan publik juga dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja pemerintah serta meminimalisir kemungkinan terjadinya pungutan liar dan korupsi.

Namun demikian, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menerapkan birokrasi digital dalam pelayanan publik. Pertama, diperlukan infrastruktur yang memadai dan terjamin keamanannya. Kedua, perlu adanya peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam mengelola sistem birokrasi digital. Ketiga, diperlukan perlindungan data pribadi dan privasi masyarakat.

Oleh karena itu, Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Jawa Barat harus melakukan persiapan yang matang dan memperhatikan berbagai aspek teknis dan non-teknis dalam menerapkan birokrasi digital.

Selain dua inovasi tersebut, ada beberapa hal yang juga perlu dikembangkan dalam menerapkan birokrasi digital dalam pelayanan hukum dan HAM. Salah satunya adalah pengembangan aplikasi berbasis web atau mobile guna memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan hukum dan HAM. Aplikasi ini harus didesain dengan baik dan mudah digunakan,

sehingga dapat meningkatkan efisiensi dalam pelayanan dan meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan.

Selain itu, perlu adanya sistem manajemen penanganan pengaduan yang terintegrasi dan transparan. Sistem ini dapat memudahkan masyarakat dalam melaporkan masalah hukum dan HAM yang dihadapi dan memantau proses penanganan pengaduan secara online. Dengan sistem ini, diharapkan masalah yang terkait dengan hukum dan HAM dapat diselesaikan dengan lebih cepat dan efektif.

Untuk menerapkan birokrasi digital dalam pelayanan hukum dan HAM, diperlukan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan dan keterampilan dalam mengelola sistem digital. Oleh karena itu, Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Jawa Barat harus melakukan pelatihan dan pengembangan keterampilan bagi para pegawainya. Selain itu, perlu adanya sinergi antara Divisi Pelayanan Hukum dan HAM dengan unit-unit terkait dalam hal pengelolaan data dan informasi. Hal ini akan memudahkan akses informasi dan data yang diperlukan dalam pelayanan hukum dan HAM.

Meskipun penerapan birokrasi digital memiliki banyak manfaat, namun ada beberapa

tantangan dan risiko yang harus dihadapi. Salah satunya adalah risiko keamanan data dan privasi. Penggunaan teknologi digital dalam pelayanan publik memerlukan pengelolaan data yang baik dan terjamin keamanannya. Selain itu, juga perlu adanya regulasi dan kebijakan yang dapat menjamin perlindungan data pribadi dan privasi masyarakat.

Dalam menerapkan birokrasi digital dalam pelayanan hukum dan HAM, perlu adanya dukungan dan kerjasama dari berbagai pihak. Selain dari internal organisasi, dukungan dan partisipasi masyarakat juga sangat penting. Dengan dukungan dari masyarakat, pengembangan birokrasi digital dalam pelayanan hukum dan HAM dapat berjalan dengan lebih lancar dan efektif.

Dalam kesimpulannya, penerapan birokrasi digital dalam pelayanan hukum dan HAM merupakan langkah yang tepat dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Namun, perlu dilakukan persiapan yang matang dan memperhatikan berbagai aspek teknis dan non-teknis. Dengan adanya birokrasi digital dalam pelayanan hukum dan HAM, diharapkan dapat memberikan pelayanan yang lebih baik dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintah.

JANGKAU CIVITAS AKADEMIKA, KEMENKUMHAM R.I. KEMBALI GOES TO CAMPUS DI 2023



Kumham Goes To Campus 2023 merupakan inisiatif penting yang dijalankan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Republik Indonesia untuk menyampaikan informasi dan pemahaman terkini mengenai Undang-Undang (UU) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru, Rancangan Undang-undang (RUU) Paten, dan Rancangan Undang-undang (RUU) Desain Industri kepada berbagai stakeholder, seperti mahasiswa, Aparat Penegak Hukum (APH), serta Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

Sebagai bagian dari upaya untuk mencapai tujuan tersebut, program ini akan diselenggarakan di 16 kota besar di seluruh

Indonesia, meliputi Banda Aceh, Padang, Bengkulu, Pekanbaru, Yogyakarta, Semarang, Bandung, Surabaya, Malang, Pontianak, Samarinda, Kendari, Sorong, Mamuju, Mataram, dan Ambon. Kegiatan ini akan mencakup beragam bentuk, seperti seminar, diskusi, workshop, pelatihan, serta sesi tanya jawab dan konsultasi dengan para penyuluh hukum dari Kemenkumham.

Salah satu fokus utama dari Kumham Goes to Campus 2023 adalah sosialisasi mengenai KUHP yang baru, yang mengatur tata cara penegakan hukum dan tanggung jawab korporasi dalam konteks hukum pidana. KUHP baru ini diharapkan dapat memberikan dasar hukum yang lebih adil, modern, dan humanis,

dengan menekankan pada pemulihan keadilan melalui pendekatan restorative justice.

Selain itu, program ini juga akan memperkenalkan RUU Paten dan RUU Desain Industri yang saat ini sedang dibahas oleh pemerintah dan DPR. RUU ini akan memiliki dampak yang signifikan pada perkembangan inovasi, industri kreatif, serta perlindungan hak kekayaan intelektual di Indonesia.

Kumham Goes to Campus 2023 akan diisi oleh berbagai kegiatan menarik yang dirancang untuk meningkatkan partisipasi dan minat masyarakat terhadap topik hukum yang dibahas. Selain sesi seminar, workshop, dan konsultasi, kegiatan ini juga akan menyediakan Booth Layanan Kemenkumham



yang akan menawarkan layanan-layanan seperti Layanan DJKI, Konsultasi KUHP, serta informasi mengenai produk dan layanan dari masing-masing Kantor Wilayah.

Sebagai tambahan, acara ini juga akan dimeriahkan dengan berbagai hiburan, seperti live music dan permainan interaktif yang dapat menarik minat peserta. Diharapkan melalui kegiatan ini, masyarakat dapat lebih memahami dan mengapresiasi pentingnya UU KUHP yang baru, serta RUU Paten dan RUU Desain Industri dalam konteks pembangunan hukum dan keadilan di Indonesia.

Kumham Goes to Campus 2023 merupakan langkah penting dalam upaya Kemenkumham untuk meningkatkan kualitas pendidikan hukum dan kesadaran masyarakat tentang peran serta

tanggung jawab mereka dalam menjaga keadilan dan ketertiban di Indonesia. Dengan melibatkan berbagai pihak, seperti civitas akademika, penegak hukum, dan Forkopimda, diharapkan program ini dapat menciptakan sinergi yang kuat dalam memajukan penegakan hukum dan kebijakan yang adil di Indonesia.

Kumham Goes to Campus 2023 juga menjadi ajang bagi Kemenkumham untuk mendengar masukan dan kritik dari masyarakat terkait kebijakan yang diterapkan. Hal ini sejalan dengan komitmen pemerintah untuk menjalankan pemerintahan yang inklusif, transparan, dan akuntabel. Melalui dialog yang terbuka dan konstruktif, Kemenkumham dan pemerintah dapat mengevaluasi dan menyempurnakan kebijakan yang ada, serta

merumuskan langkah-langkah strategis yang lebih efektif dalam upaya memperbaiki sistem hukum di Indonesia.

Selain itu, Kumham Goes to Campus 2023 juga berfungsi sebagai sarana promosi bagi Kemenkumham dan kantor wilayahnya dalam memperkenalkan berbagai layanan yang ditawarkan, seperti layanan DJKI, konsultasi Administrasi Hukum Umum, dan produk layanan lainnya. Hal ini akan membantu masyarakat lebih mudah mengakses informasi dan layanan yang mereka perlukan, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap kinerja Kemenkumham.

Dalam jangka panjang, kegiatan seperti Kumham Goes to Campus 2023 diharapkan dapat membantu menciptakan generasi muda yang memiliki pengetahuan dan pemahaman yang baik tentang hukum dan kebijakan yang ada di Indonesia. Dengan demikian, mereka akan menjadi agen perubahan yang mampu berkontribusi dalam upaya membangun sistem hukum yang lebih adil, modern, dan humanis, serta memperjuangkan hak asasi manusia dan keadilan bagi semua warga negara.

Secara keseluruhan, Kumham Goes to Campus 2023 merupakan inisiatif yang penting dan tepat waktu dalam konteks reformasi hukum di Indonesia. Melalui kegiatan ini, Kemenkumham dan pemerintah berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan dan pendidikan hukum, serta mempererat kerja sama dengan berbagai pihak dalam upaya menciptakan masyarakat yang lebih adil, sejahtera, dan berkeadilan.

ANYAMAN ROTAN HASIL KARYA WARGA BINAAN LAPAS MAJALENGKA TEMBUS PASAR DUNIA /EKSPOR

MAJALENGKA - Kerajinan rotan sintetis berupa kursi dan meja produksi warga binaan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Majalengka, berhasil tembus pasar ekspor dan menarik perhatian konsumen manca negara.

Sistem pemasyarakatan bukan saja menjadikan narapidana sebagai objek, melainkan juga subjek atas kodratnya sebagai manusia. Sistem pemasyarakatan bertujuan untuk mengembalikan warga binaan pemasyarakatan sebagai warga yang baik di tengah masyarakat. Implementasi dari sistem pemasyarakatan tersebut, Lapas Majalengka memberdayakan dan meningkatkan keterampilan kerja para Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) melalui kerjasama dengan perusahaan produsen kursi dan meja berbahan dasar rotan sintetis dari Cirebon. Atas kerjasama dengan perusahaan di bidang kerajinan tersebut, hasil produk narapidana Lapas Majalengka ini nyatanya mampu menembus pasar ekspor dan menarik perhatian konsumen manca negara.

Dengan adanya pelatihan kemandirian ini diharapkan bisa menjadi bekal bagi warga binaan setelah menjalani masa tahanannya, selain itu melalui kegiatan ini warga binaan bisamembantu pendapatan negara sekaligus mendapatkan penghasilan tambahan selama berada dalam lapas.



Kalapas Majalengka, Wawan Irawan mengatakan bahwa produksi anyaman kursi berbahan dasar rotan sintetis di bengkel kerja Lapas Majalengka kini menjadi salah satu program pembinaan unggulan, karena hasil produksi warga binaan Lapas Majalengka telah berhasil menembus pasar dunia dan mencuri perhatian pembeli dari berbagai negara.

Kalapas juga menyampaikan, "Selain mendapatkan bekal berupa ilmu dan keterampilan untuk

menjalani kehidupan setelah bebas dan kembali kepada masyarakat kelak, warga binaan juga akan mendapatkan upah dan juga sekaligus membantu dalam meningkatkan perolehan PNPB bagi negara," tutur Wawan Irawan.

LANGKAH EFEKTIF DALAM PEMBERITAAN DI MEDSOS, RUPBASAN INDRAMAYU PERINGKAT 3 TERATAS PUBLIKASI UPT.

Tak diduga Rupbasan Indramayu mendapatkan peringkat kesatu dalam pemberitaan di Media Sosial, seperti: instagram, FB dan twitter atas penilaian tim humas Kanwil Kemenkumham Jabar.

Atas perintah bpk Kanwil kemenkumham jawa barat bahwa setiap kegiatan Pimti Jawa barat agar di

glorifikasi sehingga pemberitaan kumham jabar lebih dilihat dan dibaca masyarakat luas.

UPT Rupbasan Indramayu dalam hal ini Tim Humas nya aktif dalam mengglorifikasikan pemberitaan Kegiatan Pimti Jabar dan mendapatkan penilaian 3 terbaik peringkat pertama dalam laporan

publikasi di medsos dalam kurun waktu per 22 januari sampai dengan 28 januari 2023, Abdurrohman selaku Plt. Kepala Rupbasan Indramayu memberikan penghargaan dan apresiasi kepada Tim Humas

Rupbasan atas prestasi diatas, agar bisa mempertahankan dan lebih banyak lagi pemberitaan yang positif dari Rupbasan Indramayu, sehingga masyarakat mengenal apa itu Rupbasan Indramayu.

Langkah efektif yang dilakukan Tim Humas Rupbasan Indramayu dalam pemberitaan di media sosial salah satunya menyebarluaskan berita Kanwil Kemenkumham Jabar ke media yg dimiliki Rupbasan

Indramayu secara cepat, terutama dalam media Twitter. Data terkini

pengikut twitter sebanyak 278 orang, ditambah Instagram sebanyak 786 orang, dan Facebook sebanyak 746 orang. Yang lebih penting membuat Tagar kemenkumham jabar dan R. Andika Dwi Prasetya di Twitter media sosial Rupbasan Indramayu.

Rupbasan Indramayu berpartisipasi aktif dalam setiap pemberitaan Kanwi Jabar guna meningkatkan

publikasi positif, disamping pemberitaan aktivitas pengelolaan Basan Baran dan giat lainnya Rupbasan Indramayu.





kabayanpasti.kemenkumham.go.id

INGIN IKUT
BERKONTRIBUSI?

PUNYA TULISAN
ATAU ARTIKEL

Untuk Insan Pengayoman yang ingin ikut berkontribusi mengisi artikel atau informasi yang ingin disebarluaskan.

HUBUNGI KAMI!

https://forms.gle/hjAopN5yJ9hbhh XW 6



TERIMA KASIH
Wargi Pengayoman